

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KARTU ASURANSI NELAYAN BERJAYA SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP
(Studi pada Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
Kharisma Widianingrum
NPM 2016041048**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KARTU ASURANSI NELAYAN BERJAYA SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP
(Studi pada Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Kharisma Widianingrum

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN BERJAYA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP (Studi pada Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)

Oleh

KHARISMA WIDIANINGRUM

Asuransi Nelayan Berjaya merupakan kebijakan yang dilandasi oleh Undang Undang Nomor 7 tahun 2016 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah guna memberikan jaminan perlindungan kerja kepada nelayan serta menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya sebagai upaya meningkatkan pembangunan perikanan tangkap dengan menggunakan indikator teori Jan Merse yaitu isi kebijakan, pembagian potensi, informasi, dan dukungan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung belum optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan banyak nelayan yang belum memahami asuransi secara detail sehingga dukungan masyarakat dalam perpanjangan asuransi secara mandiri sangat rendah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat melakukan perataan informasi kepada nelayan guna menaikkan minat masyarakat mengikuti asuransi secara mandiri dan juga perlu mempersiapkan solusi apabila target perpanjangan asuransi nelayan secara mandiri tidak tercapai.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Asuransi Nelayan Berjaya, Pembangunan Perikanan Tangkap.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ENFORCEMENT FISHERMEN INSURANCE CARD SUCCESSFUL POLICY AS AN EFFORT TO IMPROVE CAPTURE FISHERIES DEVELOPMENT (Study in Bumi Waras District, Bandar Lampung City)

BY :

KHARISMA WIDIANINGRUM

Berjaya Fisherman Insurance is a policy based on Law Number 7 of 2016 which is followed by Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the protection and empowerment of fishermen, fish farmers and salt farmers. assistance in paying insurance premiums provided by the government to provide job protection guarantees to fishermen and to raise awareness among fishermen of the importance of self-insurance. This research aims to analyze the implementation of the Berjaya Fisherman Insurance policy as an effort to increase capture fisheries development using Jan Merse's theoretical indicators, namely policy content, potential sharing, information and community support. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, documentation and interviews. The results of this research indicate that the implementation of the Berjaya Fisherman Insurance policy in Bumi Waras District, Bandar Lampung City, has not been optimal in its implementation, because many fishermen do not understand insurance in detail so that community support for extending insurance independently is very low. From the results of this research, the researcher recommends that the Lampung Province Maritime and Fisheries Service can distribute information to fishermen in order to increase people's interest in taking insurance independently and also need to prepare a solution if the target for extending fishermen's insurance independently is not achieved.

Key Words : Policy Implementation, Fisherman Insurance Successful, Development of Capture Fisheries.

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI
NELAYAN BERJAYA SEBAGAI UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
PERIKANAN TANGKAP (Studi pada
Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Kharisma Widianingrum**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2016041048**

Program Studi

: **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Noverman Duadji., M.Si
NIP. 196911032001121002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.
NIP. 199109242019032019

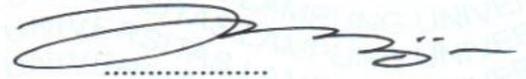
2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 197405202001122002

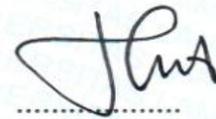
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

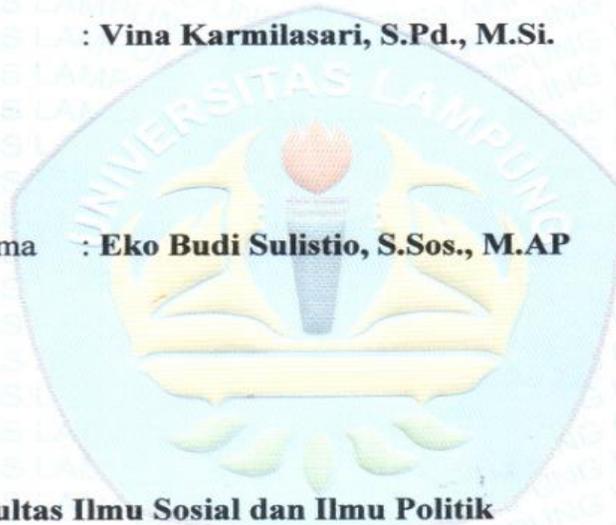
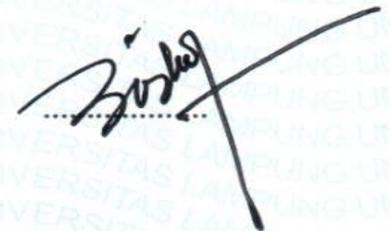
Ketua : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si**



Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.**



Penguji Utama : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Ujian Lulus Skripsi : **18 Maret 2024**

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Kharisma Widianingrum

NPM 2016041048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kharisma Widianingrum, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 April 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iwan Dwi Laksono dan Ibu Nurhayati. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SD Negeri 2 Perumnas Way Kandis yang diselesaikan tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2017 dan SMA Negeri 13 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu menjadi Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi (HUMINFO) di UKM-U PIK R RAYA Universitas Lampung tahun 2022 dan Anggota Bidang Data dan Informasi (DAIN) di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Universitas Lampung tahun 2023.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Narta, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan penempatan pada bidang keuangan dan bidang perikanan tangkap.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd: 11)

When life gets you down, you know what you gotta do? Just keep swimming!

(Dory)

One day or day one, you decide.

(Paulo Coelho)

Bagai burung-burung migran yang berpetualang mencari iklim hangat,
kami pergi untuk menggapai mimpi.

(Cho Sam Dal)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Ayah dan Bundaku Tercinta

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Adik-Adikku Tersayang

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWANCA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KARTU ASURANSI NELAYAN BERJAYA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP (Studi pada Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Bapak Iwan Dwi Laksono dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini. Semoga ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, lindungan dimanapun berada, dan keberkahan dunia dan akhirat.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima Kasih atas segala ilmu, dukungan, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis

5. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh informan penelitian, Bapak Zainal Karoman S.Pi., M.Ling., Bapak Yefi Yuslian S.Pi., M.M., Bapak Michel Serena, Bapak Turun, Bapak Hamdi, Bapak Jakroni, Bapak Adi atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
11. Seluruh pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
12. Adik-adikku tersayang, Kharisma Dwi Cahyaning Utami dan Kharisma Athalia Qirani yang sudah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang untuk kakak.
13. Seluruh anggota keluargaku tercinta, terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayangnya yang selalu diberikan kepada penulis.

14. Rico Syaputra yang sudah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir kelulusan.
15. Sahabatku Meiha yang telah menemani selama masa perkuliahan, memberikan banyak kenangan, menjadi sosok rumah yang nyaman, menampung semua keluh kesah penulis, serta menjadi teman yang selalu ada. Semoga kita diberikan rasa konsisten untuk melakukan hal hal baik.
16. Sahabatku Andin yang telah menemani selama magang sampai akhir perkuliahan, terimakasih sudah menjadi sosok yang selalu mendukung progres penulis, selalu memberikan uluran tangan, terimakasih atas semua kenangan dan pembelajaran, semoga kita sukses sesuai dengan celoteh di perjalanan pulang magang.
17. Teman temanku Ica, Ajul, Anjel, Alfi, Caya, Wikke, Lili, Rara, Syeva, Anjes, Alkaisar yang telah menemani selama masa perkuliahan, memberikan kenangan kenangan bahagia serta menjadi sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, meyakinkan penulis untuk dapat melewati semua rintangan.
18. Teman - temen KKN yaitu Elvira, Cucur, Regita, dan Okti atas segala pengalaman dan pembelajaran life skill yang harus dimiliki, terimakasih atas segala masukan dan saran agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
19. Teman-teman kelas Reguler B, terima kasih untuk setiap kebersamaan dari awal perkuliahan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini.
20. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
21. Kepada mba abang HIMAGARA, terimakasih semua saran dan bantuannya selama masa perkuliahan.
22. Kepada Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik	11
2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik	12
2.3.2 Model Model Implementasi Kebijakan Publik	13
2.4 Tinjauan Tentang Asuransi	17
2.4.1 Definisi Asuransi.....	17
2.4.2 Tujuan Asuransi	17
2.5 Tinjauan Tentang Nelayan	18
2.5.1 Definisi Nelayan	18
2.5.2 Jenis jenis Nelayan.....	18
2.6 Tinjauan Tentang Asuransi Nelayan Berjaya	19
2.6.1 Definisi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB).....	19
2.6.2 Tujuan Asuransi Nelayan Berjaya	19
2.6.3 Persyaratan Asuransi Nelayan Berjaya	19
2.7 Kerangka Pikir	20
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Tipe Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian.....	23
3.4 Sumber Data.....	24

3.4.1 Data Primer	24
3.4.2 Data Sekunder	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5.1 Wawancara.....	25
3.5.2 Dokumen.....	26
3.5.3 Observasi.....	27
3.6 Teknik Analisis Data.....	28
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	31
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung...	39
4.1.3 Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan	43
4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Implementasi Kebijakan ANB di Kecamatan Bumi Waras.....	50
4.2.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan ANB	64
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Implementasi Kebijakan ANB di Kecamatan Bumi Waras.....	66
4.3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan ANB	74
V. PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Alokasi Bantuan Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2020-2022	4
2. Daftar Alokasi Jumlah Bantuan Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2022	4
3. Daftar Sosialisasi dan Penyerahan Kartu Asuransi Nelayan Berjaya	5
4. Penelitian Terdahulu	9
5. Gambaran Data Informasi Penelitian	25
6. Gambaran Data Dokumen Penelitian	26
7. Gambaran Objek Observasi Penelitian	27
8. Jumlah Penduduk di Kecamatan Bumi Waras	33
9. Jumlah Penduduk Menurut Umur	33
10. Nelayan di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	34
11. Observasi terhadap Nelayan di Kecamatan Bumi Waras	37
12. Indikator Tanggungan Asuransi Nelayan Berjaya	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Penerima Asuransi Nelayan Berjaya (ANB) Provinsi Lampung.....	3
2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	21
3. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif.....	28
4 Peta Administrasi Kecamatan Bumi Waras.....	32
5. Wawancara dengan Bapak Jakroni dan Adi Selaku Penerima Bantuan ANB.....	35
6. Wawancara dengan Bapak Turun Selaku Penerima Bantuan ANB.....	36
7. Wawancara dengan Bapak Hamdi Selaku Penerima Bantuan ANB.....	37
8. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.....	40
9. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan.....	45
10. Kapal Nelayan Penerima Bantuan Asuransi Nelayan Berjaya.....	52
11. Perjanjian Kerjasama DKP Prov Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan.....	53
12. Hierarki Implementor Asuransi Nelayan Berjaya.....	55
13. Kondisi Perjalanan Menuju Rumah Nelayan.....	64
14. Penyebaran Informasi Digital Asuransi Nelayan Berjaya.....	72

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung mempunyai kesediaan Sumber Daya Perikanan melimpah karena mempunyai perairan laut selebar 24.820. Luasnya perairan laut di Provinsi Lampung membuat jumlah produksi perikanan 2020 mencapai 324.251 ton, yang terdiri atas Perikanan Tangkap 141.992 ton serta Perikanan Budidaya 182.259 ton. (BPS, 2020). Tingginya produksi Perikanan Tangkap di Lampung, menjadi salah satu sebab banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan bahwa pekerjaan masyarakat di Lampung didominasi oleh pekerja sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebanyak 41,72%, pada bidang perikanan yang berprofesi sebagai nelayan menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) berjumlah 24.032 orang.

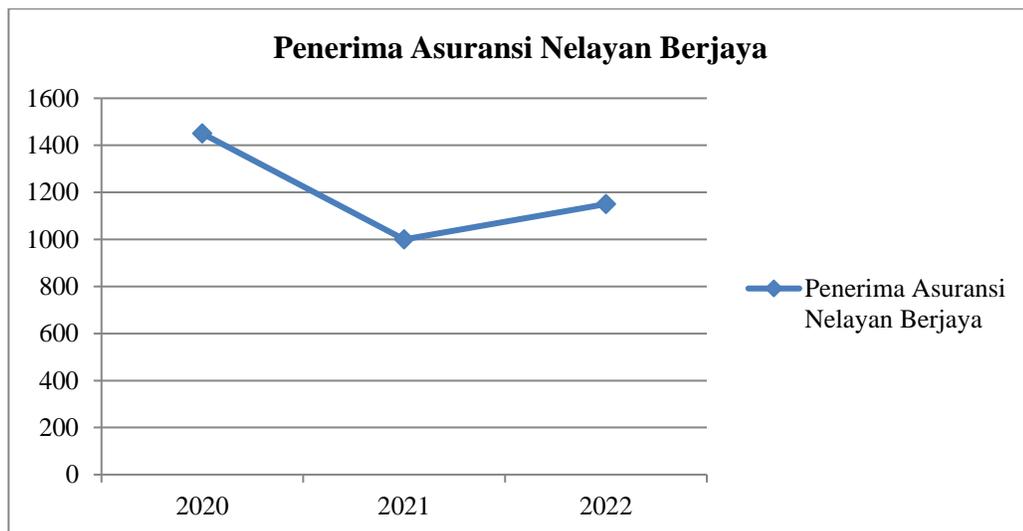
Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang berada di daerah pesisir serta hidupnya bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka (Marta dan Andry, 2020). Nelayan memiliki berbagai masalah dalam pekerjaannya seperti terbatasnya akses permodalan, minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi pada produktivitas penangkapan ikan, serta adanya resiko terjadinya kecelakaan dalam melaut yang menjadikan rendahnya pendapatan yang diterima oleh nelayan dan berpengaruh pada rendahnya kesejahteraan nelayan (Putra dkk., 2017).

Mayoritas pendidikan nelayan adalah Sekolah Dasar, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan nelayan kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja, sehingga resiko kecelakaan dalam bekerja meningkat (Marasut dkk., 2022). Komite Nasional Keselamatan Transportasi mencatat di Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021, terdapat 483 insiden kecelakaan kapal perikanan dengan korban meninggal dunia sebanyak 443 jiwa (Wuysang, 2022).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung melihat resiko tinggi kecelakaan dalam bekerja yang dialami oleh nelayan membuat suatu program yaitu Asuransi Nelayan Berjaya. Program yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung dengan Nomor 523/531/v.19-SET/2020 dan Nomor PER/18/07/2020 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Para Nelayan di Wilayah Provinsi Lampung. Perjanjian kerja sama dilandaskan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 yang dilanjutkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Lampung tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Asuransi Nelayan Berjaya merupakan sebuah hibah penunaian premi asuransi selama 10 bulan dari pemerintah daerah sebagai salah satu wujud perlindungan profesi nelayan menuju nelayan berjaya. Adapun tujuan pemberian Asuransi Nelayan Berjaya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kerja apabila terjadi kecelakaan pada saat bekerja, membangun pemahaman nelayan atas hakiki berasuransi sehingga menimbulkan ambisi mengikuti asuransi secara swadaya, menghibahkan lindungan kepada ahli waris, dan mengalihkan risiko kepada fasilitator jasa asuransi. Target Asuransi Nelayan Berjaya meliputi nelayan kecil, tradisional, serta anak buah kapal (ABK) kapal <30 *Gross Tonnage* dengan risiko bahaya yang ditanggung adalah kematian karena kecelakaan ataupun kematian alami, mengalami kondisi difabel akibat kecelakaan, serta biaya berobat karena kecelakaan (DKP Provinsi Lampung, 2020).

Mayoritas nelayan merupakan seseorang yang bertanggung jawab menghidupi keluarganya (Budi, 2021). Sehingga, ketika nelayan terjadi kecelakaan saat bekerja, nelayan tersebut tidak harus mencemaskan dana berobat serta jika nelayan tersebut terjadi kecelakaan dan mengakibatkan kehilangan nyawa akan ada dana bantuan yang diberikan dari pihak penyedia asuransi untuk menolong kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan dan memberikan dana pendidikan kepada anak-anak dari nelayan tersebut (DKP, 2022). Asuransi Nelayan Berjaya pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020, dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 3600 nelayan yang menerima Asuransi Nelayan Berjaya. Berikut adalah grafik penerima Asuransi Nelayan Berjaya di Provinsi Lampung :



Gambar 1. Penerima Asuransi Nelayan Berjaya (ANB) Provinsi Lampung

Sumber : (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022)

Data penyebaran asuransi berdasarkan Kabupaten/Kota sejak tahun 2020-2022 di Tabel 1.1, tabel tersebut menjelaskan bahwasanya jumlah sebaran bantuan asuransi di Kabupaten/Kota setiap tahunnya berbeda.

Tabel 1. Daftar Alokasi Bantuan Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KUSUKA (data KKP)	Alokasi ANB (orang) tahun 2020	Alokasi ANB (orang) tahun 2021	Alokasi ANB (orang) tahun 2022
1	Lampung Barat	231	25	25	50
2	Bandar Lampung	2.923	187	94	150
3	Lampung Selatan	2.670	111	89	75
4	Lampung Tengah	1.434	135	105	150
5	Lampung Timur	4.142	147	120	100
6	Lampung Utara	201	23	-	-
7	Mesuji	534	25	25	100
8	Pesisir Barat	2.373	148	141	150
9	Pesawaran	2.608	239	150	100
10	Pringsewu	143	25	-	25
11	Tanggamus	3.811	180	111	150
12	Tulang Bawang	2.486	105	75	50
13	Tulang Bawang Barat	697	25	65	-
14	Way Kanan	259	75	-	50
Jumlah		24.512	1.450	1000	1150

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2022)

Data Tabel 1 memperlihatkan bahwasanya Bandar Lampung memiliki nelayan terbanyak ketiga setelah Lampung Timur dan Tulang Bawang, jumlah nelayan yang tinggi membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memberikan jumlah bantuan alokasi besar. Berikut adalah data alokasi jumlah bantuan Asuransi Nelayan Berjaya di Bandar Lampung pada tahun 2022 :

Tabel 2. Daftar Alokasi Jumlah Bantuan Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2022

No	Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang menerima bantuan ANB	Alokasi Bantuan Premi ANB (orang) tahun 2022
1	Bumi Waras	79
2	Panjang	40
3	Teluk Betung Timur	31
Jumlah		150

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2022)

Besarnya jumlah penerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras harus menjadi perhatian lebih pada proses implementasinya, dikarenakan kebijakan tidak akan sukses tanpa diikuti oleh proses implementasi yang efektif dari sektor pemerintah dan juga dukungan dari masyarakat nelayan.

Pelaksanaan kebijakan publik adalah langkah pada proses kebijakan publik yang menilai kebijakan tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat dan diterima oleh masyarakat secara umum. Menurut V.Meter dan V.Horn (Tresiana dan Duadji, 2019) Pelaksanaan kebijakan adalah suatu pelaksanaan kegiatan oleh entitas pemerintah atau swasta agar mencapai tujuan. Sehingga, disimpulkan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan secara cermat, namun jika implementasi tidak dioptimalkan, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Tabel 3. Daftar Sosialisasi dan Penyerahan Kartu Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Tanggal	Keterangan Alokasi (2020)	Keterangan Alokasi (2021)	Keterangan Alokasi (2022)
1	Lampung Barat	6 November 2020 4 Juni 2021 21 Juli 2022	Penyerahan kartu	Sosialisasi dan penyerahan kartu	Sosialisasi dan penyerahan kartu
2	Bandar Lampung	22 Oktober 2020 23 Juni 2021 29 Juli 2022	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu
3	Lampung Selatan	16 Oktober 2020 28 Juni 2021 28 Juli 2022	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu
4	Lampung Tengah	4 November 2020 11 Juni 2021 19 Juli 2022	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu	Sosialisasi dan penyerahan kartu
5	Lampung Timur	19 Oktober 2020 2 Juni 2021 7 Juli 2022	Sosialisasi dan penyerahan kartu	Sosialisasi dan penyerahan kartu	Sosialisasi dan penyerahan kartu
6	Lampung Utara	4 November 2020 - -	Penyerahan kartu	-	-
7	Mesuji	3 November 2020 15 Juni 2021 5 Agustus 2022	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu	Penyerahan kartu
8	Pesisir Barat	23 Oktober 2020 28 Mei 2021 14 Juli 2022	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu

No	Kabupaten/Kota	Tanggal	Keterangan Alokasi (2020)	Keterangan Alokasi (2021)	Keterangan Alokasi (2022)
9	Pesawaran	21 Oktober 2020 31 Mei 2021 11 Juli 2022	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu
10	Pringsewu	22 Oktober 2020 - 5 Juli 2022	Penyerahan kartu	-	Sosialisasi dan Penyerahan kartu
11	Tanggamus	23 Oktober 2020 25 Mei 2021 26 Juli 2022	Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu
12	Tulang Bawang	26 Oktober 2020 8 Juni 2021 2 Agustus 2022	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	Penyerahan kartu
13	Tulang Bawang Barat	2 November 2020 10 Juni 2021 -	Penyerahan kartu	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	-
14	Way Kanan	15 Oktober 2020 - 9 Agustus 2022	Sosialisasi dan Penyerahan kartu	-	Penyerahan kartu

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2022)

Implementasi Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras telah terlaksana sesuai dengan sasaran kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori Jan Merse. bahwa isi kebijakan harus jelas, tegas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder serta melibatkan kerjasama yang baik agar dapat mencapai target (Pramono, 2020).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tidak melaksanakan sosialisasi terhadap nelayan di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang menerima Asuransi Nelayan Berjaya (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022). Hal tersebut menyebabkan masih minimnya informasi mengenai Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya yang diperoleh oleh nelayan. Menurut Jan Merse minimnya informasi dapat mengakibatkan minimnya dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan (Pramono, 2020).

Minimnya informasi dan dukungan masyarakat dalam mengikuti asuransi secara swadaya menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah mengenai perluasan pemahaman nelayan terhadap Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras. Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik menyelidiki mengenai **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Asuransi Nelayan Berjaya Sebagai Upaya Meningkatkan Pembangunan Perikanan Tangkap”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?
2. Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapat gambaran mendalam pelaksanaan implementasi kebijakan sesuai dengan teori Jan Merse pada Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
2. Mendapat gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras dalam rangka meningkatkan pembangunan perikanan tangkap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah sumber kepustakaan dari berbagai pihak dan pengalaman bagi peneliti dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan seperti implementasi kebijakan publik dalam pembahasan permasalahan implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak yang terlibat, seperti :

1. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan terkait Asuransi Nelayan Berjaya. Informasi yang diperoleh dari penelitian dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pelayanan kepada nelayan, serta berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung untuk meningkatkan minat pembayaran asuransi secara mandiri.

2. Akademis

Hasil penelitian dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan asuransi. Karya ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut dalam konteks yang serupa atau sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
Lara Indah Yandri (2017)	Implementasi Program Asuransi Nelayan Di Kota Pariaman	Dalam implementasi program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya klarifikasi mengenai Latar belakang lahirnya program ini belum sepenuhnya jelas, dan masih banyak nelayan yang belum terdaftar dalam program tersebut. Selain itu, dampak nyata program terhadap nelayan masih belum terlihat, dan regulasi seperti PERDA atau SK Walikota untuk program asuransi nelayan belum tersedia sebagai panduan pelaksanaan yang konkret.	Program Asuransi Nelayan mengalami beberapa kekurangan seperti; tidak jelasnya latar belakang kelahiran program, kurangnya pembahasan mengenai kebijakan tersebut, serta belum memberikan dampak langsung bagi nelayan. Sementara dalam penelitian di Kecamatan Bumi Waras, program Asuransi Nelayan Berjaya (ANB) telah terimplementasi dengan baik, tetapi kendalanya adalah kurangnya sosialisasi sehingga nelayan minim informasi mengenai kebijakan ANB.

Nama Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
Octafany dkk., (2022)	Implementasi Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) di Kota Sibolga	Pelaksanaan Program Asuransi Nelayan Mandiri Terpercaya (Simantep) masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan informasi kurang lengkap, pola pikir nelayan yang perlu ditingkatkan,serta terdapat kekurangan staf yang bertugas dalam menjalankan kebijakan program jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja yang dialami.	Implementasi program Asuransi Nelayan Mandiri terdapat kekurangan staf yang bertugas. Sementara dalam penelitian di Kecamatan Bumi Waras, program Asuransi Nelayan Berjaya (ANB) tidak terdapat kekurangan staf yang bertugas.
Permatasari dkk., (2020)	Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir pantai Puger Kabupaten Jember	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan seperti adanya ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada nelayan, Selain itu, hampir 80% dari total jumlah nelayan belum terdaftar pada modul KUSUKA serta BPAN, dan terdapat pula nelayan yang telah mendapatkan bantuan program ini namun mengajukannya ulang.	Implementasi Program BPAN masih terdapat jumlah nelayan yang belum terdaftar pada program KUSUKA, sedangkan nelayan yang menerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya telah terdaftar pada database KUSUKA, dikarenakan database KUSUKA menjadi persyaratan utama nelayan untuk mendapatkan bantuan Asuransi Nelayan Berjaya.

Sumber : Data Diolah oleh peneliti (2024)

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Menurut Herdiana (Desrinelti dkk., 2021) kebijakan merupakan rangkaian aktivitas, tindakan, rencana, dan keputusan yang diambil oleh aktor terkait mengatasi masalah yang dihadapi. Dunn (Maulana dan Nugroho, 2019) mendefinisikan bahwa kebijakan publik mencakup langkah langkah tindakan pemerintah yang meliputi keputusan untuk bertindak serta tidak melakukan tindakan mengenai tantangan yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Ini bisa berupa pengembangan program, pengesahan undang-undang, alokasi anggaran, atau keputusan lain yang dibuat oleh pemerintah. Bridgeman dan Davis (Aslinda, 2023) kebijakan publik mempunyai 3 dimensi yang saling terkait :

1. Kebijakan publik sebagai tujuan
kebijakan publik bertujuan mencapai hasil yang telah diharapkan oleh masyarakat melalui tindakan pemerintah. Tujuan kebijakan dapat bervariasi mulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial atau ekonomi, hingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan fokus pada pencapaian hasil tertentu, kebijakan publik dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat atau menanggulangi masalah yang ada.
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum
Keputusan kebijakan memiliki legalitas hukum dikarenakan dirancang oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan. Keputusan tersebut mengikat para aparatur negeri dalam menjalankan kebijakan.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis
Kebijakan dirancang atas dasar model, teori serta hipotesis tentang hubungan sebab dan juga akibat. Kebijakan selalu didasarkan oleh anggapan anggapan perilaku yang diinginkan serta perilaku yang tidak diinginkan. Kebijakan juga harus memiliki kemampuan meramalkan hasil yang diharapkan dan mengatasi potensi kegagalan.

2.3 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Deskripsi dari Grindle, V. Meter, V. Horn, Sabatier, dan Mazmanian (Pramono, 2020) memberikan pemahaman yang cukup komprehensif tentang proses implementasi kebijakan publik. Implementasi tidak hanya melibatkan penentuan tujuan dan alokasi dana, tetapi juga melibatkan tindakan konkret yang dilakukan oleh berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga sektor swasta agar dapat meraih sasaran yang telah dirancang. Hal ini mencakup upaya administratif dan dampak nyata pada masyarakat setelah kebijakan diterapkan. Dengan memahami berbagai aspek ini, para pembuat kebijakan dapat memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan mereka (Tresiana dan Duadji, 2019).

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan usaha yang melibatkan banyak sektor seperti sektor pemerintah dan masyarakat serta melibatkan faktor-faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan sosial. Ketepatan sasaran dan efisiensi dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk menangani masalah secara efektif. Semakin berbelit belit masalah yang terjadi, semakin penting penyelidikan yang mendalam dan penggunaan sumber daya yang tepat. Dengan melakukan analisis implementasi kebijakan secara cermat, kita dapat mengidentifikasi dampak dari kebijakan yang diterapkan dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Mansur, 2021).

2.3.2 Model Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Van Metter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Prumono, 2020) mengidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik:

1) Ukuran dan Tujuan Dari Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ukuran serta tujuan dari suatu kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di tingkatan pelaksanaan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya

kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keahlian untuk efisien mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia. Manajemen yang efektif dari sumber daya ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan akan dijalankan dengan baik, tepat waktu, dan selaras dengan hasil yang diharapkan.

3) Karakteristik dari Agen Pelaksana

Karakteristik pelaksana kebijakan haruslah sesuai dengan tugas mereka agar dapat memaksimalkan kinerja implementasi.

4) Disposisi

Kesediaan agen pelaksana untuk menerima dan menjalankan kebijakan, meskipun kebijakan tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau preferensi masyarakat setempat.

5) Komunikasi

Komunikasi antara seluruh pihak sangat penting. Komunikasi yang baik dapat membantu mengurangi hambatan pelaksanaan kebijakan.

6) Lingkungan

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di luar lingkungan pelaksanaan juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Pramono, 2020) terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan. Mereka mengembangkan sebuah model analisis implementasi yang mereka sebut sebagai "kerangka analisis implementasi". Dalam kerangka ini, mereka mengelompokkan tahapan implementasi ke 3 faktor:

1) Faktor Independen

Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana masalah yang terlibat dalam kebijakan dapat diatasi dengan mudah atau sulit. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kompleksitas teknis pelaksanaan, teori yang digunakan, variasi dalam objek kebijakan, dan sifat perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan.

2) Faktor *Intervening*

Faktor ini mencakup kemampuan untuk menjalankan proses implementasi dengan jelas dan konsisten. Ini termasuk sejauh mana hierarki di antara lembaga pelaksana seragam, serta apakah ada kebijakan yang mendukung dari lembaga pelaksana tersebut.

3) Faktor di Luar Kebijakan

faktor-faktor eksternal seperti kondisi teknologi dan ekonomi pada saat itu, dukungan masyarakat, sikap pemangku kepentingan, dukungan dari pemimpin, konsistensi sikap dari pejabat pelaksana, dan kualitas kepemimpinan yang terlibat dalam proses implementasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap proses implementasi kebijakan. Meskipun faktor-faktor ini berada di luar kendali langsung kebijakan, mereka dapat memengaruhi bagaimana kebijakan diterima, diadopsi, dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat.

3) Model George C. Edward III

Menurut Edward III terdapat 4 faktor keberhasilan implementasi kebijakan (Pramono, 2020) :

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi implementor. kemampuan implementor untuk menyampaikan tujuan dan sasaran kebijakan dengan jelas dan tepat kepada kelompok sasaran sangat penting dalam memastikan pemahaman yang baik dan dukungan dari pihak yang terlibat.. Komunikasi yang baik membantu mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya memainkan tugas pada efektivitas implementasi kebijakan. Kekurangan sumber daya, baik dalam hal kompetensi implementor maupun sumber daya finansial, dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi implementor, yang mencakup karakteristik seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis, dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Namun, sikap yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dapat menghambat proses implementasi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dan birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan. Struktur yang terlalu kompleks dan berbelit-belit akan menghasilkan prosedur yang rumit, sehingga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Aspek struktur organisasi termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

4) Model Jan Merse

Jan Merse (Pramono, 2020) menjabarkan bahwasanya teori implementasi kebijakan akan sukses jika menerapkan 4 faktor:

1) Isi Kebijakan

Isi kebijakan harus jelas, tegas, dan mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholder. Ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat menghambat implementasi serta isi kebijakan yang tidak tepat atau kurang tegas dapat menyebabkan masalah dalam pelaksanaan.

2) Pembagian Potensi

Pembagian potensi melibatkan kerja sama intensif antara berbagai pemangku kepentingan seperti sektor pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Koordinasi perlu dilakukan karena setiap pemangku kepentingan mempunyai keperluan dan tujuan berbeda.

3) Informasi

Informasi yang akurat, disampaikan tepat waktu, dan relevan merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kebijakan serta kegiatan apapun. Informasi yang baik memungkinkan para pelaku dapat memahami dengan baik isi kebijakan tujuan yang telah dirancang, serta kelompok sasaran.

4) Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat menjadi salah satu hal yang penting pada proses implementasi, hal ini dikarenakan dukungan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan berbagai macam model implementasi kebijakan, penelitian ini akan berfokus pada model Jan Merse dikarenakan kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

2.4 Tinjauan Tentang Asuransi

2.4.1 Definisi Asuransi

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian di Indonesia secara resmi mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian yang melibatkan perusahaan asuransi dan pemegang polis. Melalui perjanjian ini, perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan perlindungan atau pembayaran tertentu kepada pemegang polis dalam hal terjadi risiko yang dijamin oleh polis tersebut. Menurut Wirjono (Ayu, 2020) Asuransi adalah perjanjian di mana pihak yang menjamin yaitu perusahaan asuransi, menerima premi dari pihak yang dijamin, yaitu pemegang polis atau tertanggung, sebagai imbalan atas potensi kerugian yang mungkin dialami. Asuransi juga digambarkan sebagai perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, Pihak tertanggung membayar premi kepada penanggung untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tidak pasti (Haba dan Handayani, 2020).

2.4.2 Tujuan Asuransi

1. Pengalihan Risiko

Pihak tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi agar pihak tertanggung dapat memindahkan risiko yang mengancam harta benda atau jiwa mereka kepada perusahaan asuransi. (Haba dan Handayani, 2020).

2. Pembayaran Ganti

Ketika suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian terjadi, perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Besarannya akan sejalan dengan jumlah asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung. Kerugian yang timbul mungkin hanya sebagian atau rusak sepenuhnya (Haba dan Handayani, 2020).

2.5 Tinjauan Tentang Nelayan

2.5.1 Definisi Nelayan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 mendefinisikan bahwa seorang nelayan adalah seseorang yang mencari nafkah dengan melakukan penangkapan ikan. Marta dan Andry (2020) menggambarkan nelayan sebagai kelompok masyarakat yang secara geografis tinggal di daerah pesisir dan hidupnya bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan adalah individu atau kelompok yang melakukan penangkapan ikan dan bergantung pada sumber daya laut.

2.5.2 Jenis jenis Nelayan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam mengelompokkan nelayan pada 4 kategori nelayan:

1. Nelayan Kecil

Nelayan kecil adalah mereka yang menangkap ikan untuk menunaikan kebutuhan harian. Mereka menggunakan kapal dengan ukuran <10 *Gross Tonnage* atau tidak menggunakan kapal sama sekali.

2. Nelayan Tradisional

Nelayan tradisional adalah mereka yang menangkap ikan di perairan perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

3. Nelayan Buruh

Nelayan buruh adalah mereka yang menyiapkan tenaganya untuk ikut serta pada usaha atau kegiatan penangkapan ikan.

4. Nelayan Pemilik

Nelayan pemilik adalah mereka yang mempunyai kapal dan terlibat secara aktif dalam proses penangkapan ikan dengan menggunakan kapal yang mereka miliki.

2.6 Tinjauan Tentang Asuransi Nelayan Berjaya

2.6.1 Definisi Asuransi Nelayan Berjaya (ANB)

Asuransi Nelayan Berjaya merupakan bangunan perlindungan yang ditujukan untuk nelayan, termasuk nelayan kecil dan tradisional, dengan tujuan mendukung kelangsungan usaha penangkapan ikan. Program ini menyediakan bantuan premi asuransi selama 10 bulan. Setelah periode tersebut berakhir, nelayan diharapkan dapat membayar premi secara mandiri kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, asuransi ini memberikan jaminan perlindungan kerja kepada nelayan jika terjadi kecelakaan saat bekerja (DKP Provinsi Lampung, 2022).

2.6.2 Tujuan Asuransi Nelayan Berjaya

Tujuan utama Asuransi Nelayan Berjaya adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja kepada nelayan, seperti risiko kematian dan cacat tetap. Selain itu, Asuransi Nelayan Berjaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nelayan tentang pentingnya memiliki asuransi, mendorong nelayan untuk berpartisipasi dalam asuransi secara swadaya, menyalurkan derma kepada ahli waris, dan mengalihkan tanggungan bahaya kepada penyedia asuransi atau penyelenggara jaminan sosial adalah langkah-langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial nelayan serta keluarganya (DKP Provinsi Lampung, 2022).

2.6.3 Persyaratan Asuransi Nelayan Berjaya

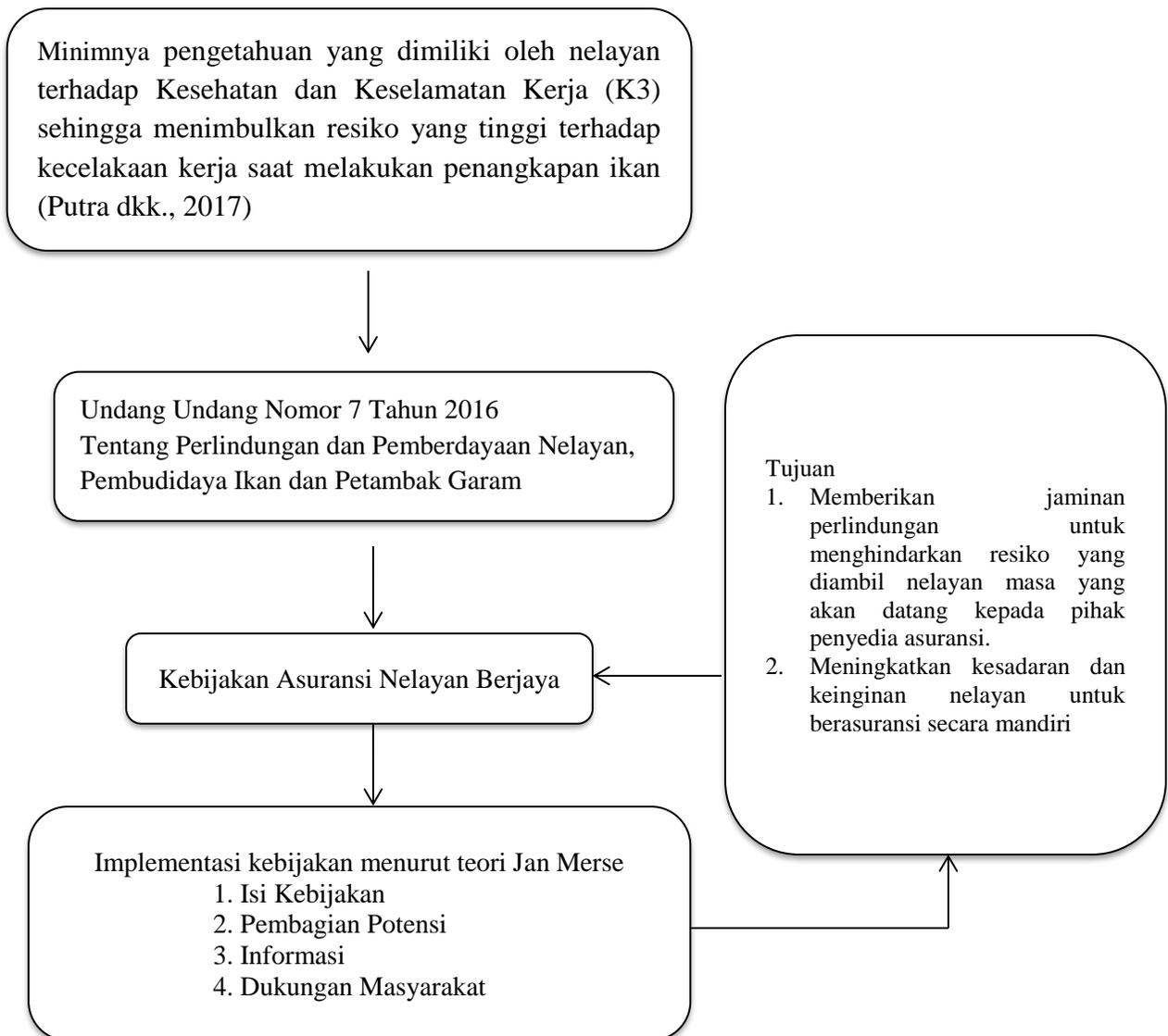
1. Harus tercatat secara individu dalam database KUSUKA yang dapat diakses melalui situs satudata.kkp.go.id.
2. Usia maksimum penerima adalah 65 tahun.
3. Penerima bisa berupa nelayan tradisional dan kecil yang menaiki kapal dengan ukuran <10 *Gross Tonnage*.

4. Juga termasuk anak buah kapal perikanan yang beroperasi dengan kapal berukuran kurang dari 30 GT.
5. Penerima tidak boleh menggunakan alat penangkapan ikan yang dianggap ilegal menurut peraturan yang berlaku.
6. Pemberian prioritas kepada nelayan yang tidak menerima program asuransi dari instansi pemerintah lain pada tahun yang sama, serta kepada yang nelayan yang memiliki asuransi namun telah berakhir ataupun asuransi dengan jenis risiko yang berbeda.
7. Semua penerima wajib mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

2.7 Kerangka Pikir

Nelayan merupakan pekerjaan yang berbahaya, dikarenakan dalam pekerjaannya nelayan memiliki potensi untuk mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat ataupun kematian (Putra dkk., 2017). Akan hal tersebut, pemerintah membuat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Hak nelayan untuk mendapatkan jaminan dari risiko berbahaya sebagaimana diatur pada pasal 3 huruf (e) bahwa salah satu hak seorang nelayan adalah terlindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran.

Pemerintah membuat suatu kebijakan agar mensejahterakan nelayan kedepannya. Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya dirancang atas dasar melihat resiko tinggi kecelakaan di laut dan dapat mengancam keselamatan hidup nelayan yang berada di laut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Jan Merse yaitu (1) Isi Kebijakan, (2) Pembagian Potensi, (3) Informasi, dan (4) Dukungan Masyarakat.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menjelajahi makna penting oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial tertentu, dalam hal ini implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras. Melalui metode deskriptif, peneliti bisa meilustrasikan kisah mengenai permasalahan yang diteliti, termasuk kondisi aktual, faktor-faktor yang terlibat, dan implikasinya bagi pemangku kepentingan. Dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam memahami dan mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras.(Wijaya, 2020).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kepentingan menentukan topik penelitian, urgensi yang jelas, ketersediaan sumber daya dana, manusia, dan waktu. Fokus penelitian sangat penting karena membantu peneliti dalam menentukan data yang relevan dan memberikan batasan studi pada penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2019). Fokus penelitian pada implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah:

1. Tahap-tahap implementasi kebijakan menurut Jan Merse (Pramono, 2020)
 - 1) Isi Kebijakan dalam proses implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras.
 - 2) Pembagian Potensi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan BPJS Ketenagakerjaan pada mengimplementasikan kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras.
 - 3) Penyebaran Informasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan penerimaan informasi oleh nelayan yang menerima Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras.
 - 4) Dukungan Masyarakat yaitu nelayan yang menerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras terhadap kebijakan ANB.
2. Pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung. Dengan mengidentifikasi faktor ini dapat menyediakan interpretasi mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut, serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

3.3 Penetapan Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti memilih Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung sebagai lokasi riset menginvestigasi implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya dikarenakan di kecamatan ini terdapat jumlah nelayan tangkap yang lebih banyak dalam menerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Timur di Kota Bandar Lampung tetapi pada implementasinya tidak terdapat sosialisasi. Sehingga, Kecamatan Bumi Waras dianggap sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya serta dampaknya pada nelayan Kecamatan Bumi Waras.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan seperti wawancara dan observasi. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber daya manusia yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan tersebut atau yang mempunyai pemahaman langsung mengenai masalah yang sedang dikaji. Melalui wawancara dengan informan dan observasi langsung, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya pada nelayan di wilayah tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, namun berasal dari referensi lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, informasi tertulis, atau data yang telah diolah sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dapat mencakup berbagai jenis dokumen seperti laporan kebijakan, data statistik, rekaman pertemuan, atau literatur terkait yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder juga dapat membantu peneliti dalam memahami konteks lebih luas terkait dengan topik penelitian, serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Berger (Kriyantono, 2020) wawancara merupakan metode himpunan data yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan informan. Informan adalah seseorang yang mempunyai ilmu atau keahlian yang relevan terkait dengan objek penelitian yang ingin diselidiki oleh peneliti. Menurut Herdiansyah (2019) Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Keuntungan wawancara yaitu memungkinkan pengkaji untuk mengeksplorasi dan menggali informasi yang kompleks dan mendalam, serta memperoleh wawasan yang lebih personal. Namun, wawancara juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kejujuran dan kepercayaan informan, serta memerlukan waktu dan usaha yang cukup untuk persiapan dan pelaksanaannya.

Tabel 5. Gambaran Data Informasi Penelitian

No	Informan	Nama Informan	Informasi Yang Dicari
1	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Bapak Zainal Karoman S.Pi.,M.Ling	1) Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya 2) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya
2	Kepala Seksi Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Bapak Yefi Yuslian S.Pi., M.M	1) Kesesuaian sasaran asuransi dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan 2) Pembagian potensi dengan BPJS Ketenagakerjaan 3) Informasi yang diberikan kepada nelayan 4) faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya
3	Seksi <i>Account Representative</i> Khusus BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung	Bapak Michel Serena	1) Proses pembagian potensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2) Dukungan masyarakat terhadap Asuransi Nelayan Berjaya 3) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya.

4	Nelayan di Kecamatan Bumi Waras yang menerima Asuransi Nelayan Berjaya 2022	1) Bapak Turun 2) Bapak Hamdi 3) Bapak Jakroni 4) Bapak Adi	1) Gambaran umum mengenai pendapatan nelayan dalam mencari ikan 2) Informasi yang didapatkan oleh nelayan pada kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya 3) Dukungan masyarakat terhadap kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya
---	---	--	--

Sumber : Data Diolah (2024)

3.5.2 Dokumen

Menurut Mardawani (2020) dan Hermawan & Amirullah (2016) dokumen dalam konteks penelitian adalah metode himpunan data yang penting. Metode ini mengaitkan pengumpulan, pengamatan, dan analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan subjek penelitian atau topik yang sedang diteliti. Dokumen yang dimaksud bisa berupa berbagai jenis dokumen seperti laporan, rekaman, catatan, kebijakan, surat-menyurat, dan dokumen lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan yang akan diteliti.

Tabel 6. Gambaran Data Dokumen Penelitian

No	Nama Dokumen	Informasi Yang Dicari
1	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sistematika Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya.
2	Laporan Pelaksanaan Asuransi Nelayan Berjaya 2022	Data nelayan yang telah mendapatkan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras
3	Laporan Tahunan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2020-2022	Data nelayan yang menerima asuransi serta peta persebaran informasi Asuransi Nelayan Berjaya Tahun 2020-2022 di Provinsi Lampung
4	MoU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung	Perjanjian kerjasama dalam Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya
5	Data monografi Kecamatan Bumi Waras Tahun 2021	Data terkait kependudukan di Kecamatan Bumi Waras

Sumber : Data Diolah (2024)

3.5.3 Observasi

Menurut Patton (Haryono 2020), Observasi merupakan metode penelitian pada penelitian kualitatif karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, observasi dilakukan secara mengamati langsung aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih mendetail dan kontekstual tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, perilaku dan aktivitas yang terjadi, serta dampaknya terhadap nelayan dan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana kebijakan tersebut berfungsi dalam praktiknya di tingkat lokal.

Tabel 7. Gambaran Objek Observasi Penelitian

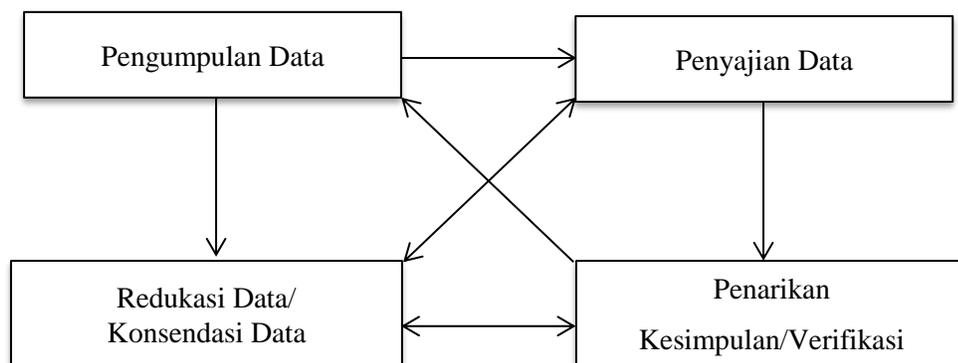
No	Objek Yang Diamati	Informasi Yang Dicari
1	Kapal dan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan penerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya	Kesesuaian penerima asuransi nelayan berjaya dengan isi kebijakan yang telah ditetapkan
2	Pembagian Potensi dalam melaksanakan Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya.	Proses koordinasi dengan pihak pihak yang terlibat.
3	Penyebaran informasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan penerimaan informasi oleh nelayan yang menerima Asuransi Nelayan Berjaya.	Sistematika komunikasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Asuransi Nelayan Berjaya.
4	Dukungan Masyarakat khususnya nelayan terhadap kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya.	Pembayaran asuransi secara mandiri setelah masa bantuan selesai.
5	Aksesibilitas menuju lokasi nelayan penerima bantuan Asuransi Nelayan Berjaya	Kondisi perjalanan yang menjadi hambatan dalam memberikan informasi secara langsung kepada nelayan

Sumber : Data Diolah (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Pengabsahan data merupakan proses penting dalam penelitian yang berkaitan dengan mengetahui bahwa bahan yang digunakan mencerminkan variabel yang ingin diukur atau diteliti. Pada penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data melalui berbagai teknik, seperti triangulasi, untuk memastikan keandalan dan kevalidan data yang diperoleh. Hal ini penting agar peneliti dapat memberikan interpretasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap temuan penelitiannya.

Analisis data merupakan tahap penting penelitian kualitatif di mana bahan yang didapatkan dari berbagai referensi seperti wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi disusun secara sistematis (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan, seperti yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melibatkan aktivitas yang interaktif dan berkelanjutan hingga semua data telah terurai. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hal tersebut membantu peneliti dalam mengorganisir dan menyajikan data agar lebih mudah dimengerti oleh pengkaji maupun orang lain yang tertarik pada penelitian tersebut.



Gambar 3. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif

Sumber : (Miles et al., 2014)

1. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam penelitian merupakan proses penghimpunan bahan dari berbagai referensi seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Bahan ini merupakan bahan mentah yang akan dianalisis.

2. Reduksi Data

Peneliti akan menganalisis bahan untuk mengurangi, menyusutkan, dan merapikan informasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami data secara lebih mendalam dan mengidentifikasi beberapa kategori yang muncul.

3. Penyajian Data

Data yang telah selesai dilakukan reduksi, data disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mencoba untuk memahami makna data dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian dapat digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.

3.7 Teknik Uji Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah suatu langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui sesuatu bahwa bahan kajian yang digunakan pada penelitian mencerminkan variabel yang ingin diteliti, metode yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan data adalah melalui teknik triangulasi. Menurut Miles dkk (2014), triangulasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah salah satu bentuk triangulasi yang melibatkan penggunaan beberapa sumber data yang berbeda untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan menganalogikan hasil bahan yang didapatkan dari berbagai referensi seperti wawancara, observasi lapangan, atau dokumentasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah bentuk triangulasi mempraktikan melalui pemeriksaan kembali bahan yang didapatkan dari referensi yang sama, tetapi mempraktekkan metode berbeda. Misalnya, bahan yang didapatkan melalui observasi lapangan dapat diperkuat dengan melakukan wawancara terhadap responden yang sama. Dengan melakukan triangulasi teknik, peneliti dapat meningkatkan keandalan dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan strategi yang dipakai dalam menguji keandalan bahan dengan memeriksa kembali informasi dari sumber, namun pada waktu yang berbeda. Triangulasi waktu dapat membantu meningkatkan keandalan dan validitas data dengan memperhitungkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau dalam konteks yang berbeda.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan cukup baik karena ditinjau dari teori implementasi kebijakan Jan Merse hanya 2 aspek yang terpenuhi yaitu Isi Kebijakan dan Pembagian Potensi. Pada aspek Isi Kebijakan telah sesuai isi yang telah ditetapkan dengan target dan sasaran yang mendapatkan asuransi nelayan berjaya, lalu pada aspek pembagian potensi telah terjalin sukses, hal ini dibuktikan dengan terjalinnya hubungan kerjasama sejak tahun 2020 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung serta target yang selalu terimplementasikan secara 100 persen pada target yang telah ditetapkan. Namun pada aspek Informasi dan Dukungan Masyarakat tidak terlaksana dengan baik, pada aspek Informasi tidak terdapat sosialisasi bagi nelayan yang menerima bantuan asuransi nelayan berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, dari keterbatasan informasi tersebut membuat nelayan tidak mengetahui bahwa asuransi yang mereka dapatkan hanyalah sebuah bantuan premi asuransi selama 10 bulan sehingga mempengaruhi faktor dukungan masyarakat mengenai pembayaran asuransi secara mandiri pada kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya.

2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan Berjaya di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung terdapat pada proses administrasi, pada tahap awal pelaksanaan kerjasama BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memberikan persyaratan surat pendirian perusahaan dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik. Namun, setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat melakukan hubungan mitra dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara jaminan sosial tunggal. Selanjutnya adalah koordinasi data nelayan, pada verifikasi data nelayan memakan waktu dikarenakan nelayan tersebut harus di *cross check* pada modul KUSUKA, setelah data tersebut valid dan sesuai dengan kriteria data tersebut diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada penginputan data di system BPJS masih terdapat beberapa data nelayan yang sudah menerima bantuan asuransi sehingga harus dicarikan data calon penerima baru. Hambatan ketiga adalah aksesibilitas, posisi nelayan yang berada di wilayah pesisir membuat sulit dijangkau untuk memberikan informasi. Hambatan terakhir yaitu pengetahuan SDM yang rendah yang berdampak pada kesadaran nelayan terhadap pentingnya berasuransi, nelayan lebih mementingkan kebutuhan sandang pangan dan papan terlebih dahulu daripada pembayaran asuransi setiap bulannya, sehingga dari hal tersebut membuat nelayan tidak melanjutkan Asuransi Nelayan Berjaya secara mandiri.

5.2 Saran

1. Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung agar dapat melakukan perataan informasi kepada nelayan guna menaikkan minat masyarakat mengikuti asuransi secara mandiri.
2. Kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung atau penyuluh agar dapat melakukan konfirmasi kepada nelayan mengenai pembayaran asuransi secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslinda, Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*.
- Asyaa, M. F., & Agusta, I. (2021). Analisis Partisipasi Nelayan Dalam Program Asuransi Nelayan Program. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(2), 294–311.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Bumi Waras Dalam Angka 2021*.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Produksi Perikanan Tangkap (TON) Provinsi Lampung*. <https://lampung.bps.go.id/indicator/56/497/1/produksi-perikanan-tangkap.html> (di akses 8 oktober 2023)
- Cahyono, Budi. (2021). Para Nelayan Menjadi Tulang Punggung Keluarga, Perlu Perlindungan Asuransi Untuk Proteksi. [ayosemarang.com. https://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-77813951/Para-Nelayan-Menjadi-Tulang-Punggung-Keluarga-Perlu-Perlindungan-Asuransi-untuk-Proteksi](https://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-77813951/Para-Nelayan-Menjadi-Tulang-Punggung-Keluarga-Perlu-Perlindungan-Asuransi-untuk-Proteksi) (diakses pada 8 oktober 2023)
- Citra, Ayu S. (2020). *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo. Tersedia dari iPusnas.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. 6(1), 83–88.
- DKP Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Tahunan Asuransi Nelayan Berjaya Lampung*
- Haba, Muhammad Ramli., Handayani, Sri. (2020). *Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo. Tersedia dari Ipusnas.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher).

- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*.
- Hermawan, S., & Amirullah, A. (2016). *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press Anggota IKAPI.
- KKP. (2021). Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap di PUD Menurut Provinsi. <https://statistik.kkp.go.id/home/php> [diakses pada 15 Agustus 2023]
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Lara, I. Y. (2017) *Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman* (Tesis, Universitas Andalas, Padang). Diperoleh dari <http://scholar.unand.ac.id/24273/>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II), 324–334.
- Marasut, J., Kawatu, P. A. ., & Nelwan, J. E. (2022). Gambaran Pengetahuan dan Sikap Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Nelayan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal KESMAS*, 11(2), 115–122.
- Mardawani, M. (2020). *Praktis penelitian kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Deepublish: Yogyakarta.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhtar, Muhtar., (2022). *Tujuan Negara Republik Indonesia dan Cara untuk Mencapainya*. Artikel UICI
- Octafany, M., Harahap, R. H., & Ginting, B. (2022). Implementasi program asuransi nelayan mandiri terpercaya (simantep) di Kota Sibolga. *Histeria Jurnal: Ilmiah ...*, 1(2), 121–131.
- Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 225. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12056>

- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Pemerintah Daerah. 2019. Peraturan daerah Provinsi Lampung No 8 tahun 2019 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sekretaris daerah Provinsi Lampung. Lampung
- Putra, R. S., Purwangka, F., & Iskandar, B. H. (2017). Pengelolaan Keselamatan Kerja Nelayan Di Ppi Batukaras Kabupaten Pangandaran. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.29244/core.1.1.37-46>
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1985. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahri, Isyatun Mardhiyah., Maya Fitria (2018). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Nelayan di Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos Ukk) Puskesmas Belawan. *Talenta Tropical Medice*. 202-206.
- Tachan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik (AIPI). Bandung
- Tresiana, Novita., Noverman Duadji. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wahyuddin, & Mauliyana. (2021). The Effect of Premium Revenue , Underwriting Results , Investment Results , and Risk Based Capital on Income in Insurance Company (Study on Corporate Insurance). *Quantitative Economics and Management Studies (QEMS)*, 2(6), 2722-6247.
- Widian Marta, Andry Novrianto. (2020). *Perubahan Provesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*.
- Wuysang, J. H. (2022). Banyak Kecelakaan, KNKT: Pelayaran Kapal Ikan Harus Segera Dibenahi. *Pikiranrakyat.Com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015193163/banyak-kecelakaan-knkt-pelayaran-kapal-ikan-harus-segera-dibenahi> (diakses 20 agustus 2023)